

# DETERMINASI PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Irfan Hilmi Munawar<sup>1</sup>, Tofan Ibrahim<sup>2</sup>

*DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya, Indonesia<sup>1</sup>*

*STISIP Bina Putera Banjar, Banjar, Indonesia<sup>2</sup>*

E-mail: [irfanhilmimunawar@gmail.com](mailto:irfanhilmimunawar@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel independen yaitu pengawasan dan variabel dependen yaitu efektivitas kerja. Teknik pengambilan sampel adalah *Simple Random Sampling* yaitu merupakan teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak sehingga diperoleh jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dengan menggunakan *path analysis*. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan terhadap efektivitas pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, artinya semakin meningkat pengawasan akan semakin meningkatkan efektivitas.

**Kata Kunci:** Pengawasan; efektivitas; Target Pajak Bumi dan Bangunan.

## Abstract

*The purpose of this study is to determine and analyze the effect of Supervision on the Effectiveness of Achieving Land and Building Tax Targets at the Pancatengah District Office of Tasikmalaya Regency. The method used in this study is causal associative research with a titative approach. The variables used in this study are one independent variable, namely supervision and the dependent variable, namely work effectiveness. The sampling technique is Simple Random Sampling, which is a sampling technique for population members that is carried out randomly so that the number of samples studied in this study is as many as 100 respondents. Data collection techniques use literature studies and field studies. Data analysis techniques using path analysis. Based on the results of the analysis, it can be concluded that simultaneously there is a positive and significant influence of supervision on the effectiveness of achieving the Land and Building Tax Target at the Pancatengah District Office of Tasikmalaya Regency, meaning that the more supervision will increase the effectiveness.*

**Keywords:** Supervision; Effectiveness; Land and Building Tax Target.

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah yang diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindung.

Bagi sebagian kalangan yang mendukung pendaerahan PBB, transparansi dan akuntabilitas dinilai akan dapat lebih diwujudkan jika pengelolaan PBB diserahkan kepada masing-masing daerah otonom. Hal ini pada gilirannya akan membawa iklim demokrasi yang lebih baik dan berakar langsung pada persoalan-persoalan konkrit di daerah yang bersangkutan. Mereka melihat bahwa pembiayaan kebutuhan daerah yang sebagian besar dibiayai dana transfer dari pusat kurang mencerminkan akuntabilitas dari pengenaan pajak daerah dan tidak memberikan insentif bagi daerah untuk menggunakan anggaran secara efisien. Asumsinya jika

pembiayaan kebutuhan daerah dibiayai sebagian besar dari alokasi dana pusat, maka otomatis kurang memberikan dorongan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya bila derajat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak tersebut tinggi, maka kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah atas pelayanan publik yang langsung mereka nikmati juga makin tinggi. Bersamaan dengan itu pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena setiap pembebanan kepada masyarakat memerlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Argumen lainnya yang dilontarkan adalah bahwa objek pajak PBB P2 dan BPHTB bersifat *immobile*, dalam arti tidak dapat direlokasi ke daerah lainnya, sehingga lebih pantas apabila dijadikan pajak daerah.

Salah satu penerima menerima penghargaan lunas pembayaran Bidang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tingkat Jawa Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya dimana yang menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan PBB P2 dapat dilihat dari efektifitas peningkatan *local taxing power* daerah parameternya adalah hasil (*yield*) yang cukup memadai, keadilan (*equity*), berdaya guna ekonomi (*economic efficiency*), kemampuan melaksanakannya (*ability to implement*) dan kecocokan PBB P2.

Namun demikian di samping kelebihan pengalihan PBB P2 sebagai otonomi, sebagai kelemahan juga bagi kalangan yang kontra terhadap pendaerahan PBB berargumen bahwa, walaupun selama ini PBB dan BPHTB dikelola sebagai pajak pusat, namun dengan majunya teknologi informasi dan terbukanya iklim politik, tidak ada alasan yang cukup untuk menggugat masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ke dua jenis pajak tersebut. Semua pihak dapat dengan mudah ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan ke dua jenis pajak tersebut dan bagaimana distribusinya. Jika dilihat dari proses pemungutannya, pemerintah daerah telah terlibat aktif seperti pelaksanaan penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak, pelaksanaan penagihan yang dilakukan secara bersama-sama dengan dibentuknya tim intensifikasi penagihan PBB (yang anggotanya terdiri dari aparat pemerintah daerah dan aparat pajak). Akan tetapi peran daerah yang signifikan tersebut tidak secara otomatis bahwa daerah mampu mengelola pajak ini dengan baik seperti yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti masalah teknis administratif, SDM, struktur organisasi, teknologi informasi dan masih banyak hal-hal lainnya. Demikian juga masalah bagaimana menjaga kesinambungan penerimaan negara (*fiscal sustainability*) dan beban pajak masyarakat, jangan sampai upaya pendaerahan PBB dan BPHTB itu justru semakin menambah beban masyarakat daerah yang kesadaran pajaknya masih rendah.

Berdasarkan hasil observasi target pajak belum tercapai dikarenakan kurangnya pembinaan di berbagai sektor termasuk faktor pengawasan maupun faktor partisipasi. Berdasarkan data diketahui target PBB selama tahun 2022:

Faktor penghambat, yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak, dan faktor penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Ketidakhahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang

ada menjadikan wajib pajak memilih untuk tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikarenakan wajib pajak tidak memahami

Tabel 1. Target PBB Tahun 2022 Kecamatan Pancatengah

DESA	Jumlah SPPT	PAJAK BERDASARKAN	
		TARGET (Rp)	REALISASI
Cibongas	5.463	47.945.905	73,20%
Tonjong	4.394	36.740.756	68,68%
Jayamukti	4.027	32.223.260	77,15%
Pancawangi	3.011	26.193.216	81,55%
Pangliaran	3.133	30.747.449	78,66%
Cibuniasih	3.545	37.496.691	82,10%
Margaluyu	2.860	28.655.299	80,15%
Cikawung	3.746	30.757.086	81,57%
Tawang	3.711	42.503.086	77,33%
Mekarsari	5.652	42.503.959	78,14%
Neglasari	6.786	48.184.468	77,16%
Jumlah	46.328	72.881.992	78,55%

*Sumber: Data Target PBB Kecamatan Pancatengah, 2023.*

Faktor penghambat, yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak, dan faktor penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Ketidapkahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada menjadikan wajib pajak memilih untuk tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikarenakan wajib pajak tidak memahami terhadap arti dari pajak dalam membiayai pembangunan.

## LANDASAN TEORI

Suatu organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai aktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan. Agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif, diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Konsep efektivitas bisa digunakan sebagai keberhasilan suatu organisasi.

Hubungan pengawasan dengan efektivitas sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan. Fungsi perencanaan perusahaan menentukan sasaran yang akan dicapai serta pedoman-pedoman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi perencanaan bagaimanapun baiknya akan menjadi kurang berarti tanpa disertai pengawasan yang baik, karena tidak dapat dipastikan apakah langkah-langkah yang sedang atau telah dilakukan mencapai sasaran atau justru menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Sehingga dengan kata lain

semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Selain itu pengawasan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam usaha memelihara kelancaran kerja agar semua aktivitas dapat selesai sesuai dengan rencana. Melalui pelaksanaan pengawasan perusahaan dapat membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bilamana terjadi penyimpangan.

Menurut Handoko (2001: 25), pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Handoko (2001: 26) menyatakan bahwa fungsi pengawasan mempunyai unsur-unsur:

- a. Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan  
Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan  
Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap kedua ini menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan  
Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:
  - 1) Pengamatan.
  - 2) Laporan-laporan baik lisan ataupun tertulis.
  - 3) Metode-metode otomatis.
  - 4) Pengujian atau dengan pengambilan sampel.
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan  
Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan  
Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa aktivitas pengawasan penting dioperasikan oleh manajer. Kebutuhan pengawasan sama pentingnya dengan kebutuhan perencanaan. Aktivitas perencanaan sebagai kunci awal pelaksanaan aktivitas organisasi, sedangkan aktivitas pengawasan sebagai kunci akhir untuk evaluasi aktivitas yang telah dilaksanakan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila perlu.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan tersebut, maka pengawasan harus dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu yang akan datang.

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan juga dapat diartikan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. Selain itu pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari pelayanan yang diberikannya. Fungsi pengawasan mempunyai kaitan yang erat terhadap efektivitas suatu kegiatan.

Menurut Robbins (2007: 49) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam organisasi:

1. Waktu

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.

2. Tugas

Bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada karyawan

3. Produktivitas

Seorang karyawan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya

4. Motivasi

Manajer dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi karyawan untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.

5. Evaluasi Kerja

Manajer memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahan, sebaliknya bawahan harus melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan untuk dievaluasi tugas terlaksana dengan baik atau tidak

6. Pengawasan

Dengan adanya pengawasan maka kinerja karyawan dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

7. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang karyawan sewaktu bekerja.

8. Perlengkapan dan Fasilitas

Adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi kelancaran karyawan dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Dari pendapat di atas jelas terlihat bahwa suatu kebijakan pemerintah dibuat untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu yang dapat dinyatakan dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit atau bentuk-bentuk kebijakan lainnya. Namun dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor penentu pemenuhan kebijakan dan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan.

Untuk mendapatkan suatu hasil pekerjaan yang baik dan bermutu tinggi maka diperlukan pengawasan yang baik. Menurut Manullang (2002: 172), pengawasan adalah proses untuk mengkoordinir apa yang dilaksanakan, mengevaluasi dan bila perlu menetapkan tindakan korektif sedemikian rupa sehingga pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan baik dalam instansi pemerintah atau swasta. Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka efektivitas kerja karyawan akan dapat berjalan lancar dan dapat menciptakan hasil kerja yang optimal. Pengawasan yang baik akan mendorong karyawan lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel independen yaitu pengawasan (X) dan variabel dependen yaitu efektivitas kerja (Y).

Secara operasionalisasi variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Pengawasan (variabel X)  Handoko (2001: 363)	1. Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan	- Adanya satuan pengukuran standar yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil
	2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan	- menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat
	3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan	- pengamatan - laporan-laporan baik lisan maupun tertulis - metode-metode otomatis - pengujian atau dengan pengambilan sampel

	<p>4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan</p> <p>5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan</li> <li>- adanya tindakan koreksi/ perbaikan untuk memperbaiki kinerja yang rendah di bawah standar.</li> <li>- Tindakan perbaikan dapat berupa merubah standar, memperbaiki pelaksanaan, atau melaksanakan perbaikan bersamaan.</li> </ul>
<p>Efektivitas Kerja (variabel Y)</p> <p>Robbins (2007: 49)</p>	<p>1. Waktu</p> <p>2. Tugas</p> <p>3. Produktivitas</p> <p>4. Motivasi</p> <p>5. Evaluasi Kerja</p> <p>6. Pengawasan</p> <p>7. Lingkungan kerja</p> <p>8. Perlengkapan dan fasilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan waktu</li> <li>- bawahan tahu maksud tugas yang didelegasikan</li> <li>- Pentingnya tugas yang didelegasikan</li> <li>- Produktivitas kerja yang tinggi menghasilkan efektivitas kerja yang baik.</li> <li>- Perhatian pada kebutuhan</li> <li>- Tujuan yang sensitif</li> <li>- Pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi pada bawahan</li> <li>- Bawahan melaksanakan tugas dengan baik</li> <li>- Menyelesaikan untuk dievaluasi</li> <li>- Dengan pengawasan, kinerja karyawan dapat terpantau</li> <li>- Dapat memperkecil risiko kesalahan</li> <li>- Tata ruang</li> <li>- Cahaya alam</li> </ul>

		- Sarana - peralatan
--	--	-------------------------

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalayayang terdiri dari 11 desa, jumlah wajib pajak yang memiliki SPPT sebanyak 46.328 (berdasarkan data target Kecamatan Pancatengah 2022). Teknik pengambilan sampel adalah *Simple Random Sampling* yaitu merupakan teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak sehingga diperoleh jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden. Jumlah ini menurut peneliti dinilai sudah cukup representatif (mewakili) dari total populasi tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dengan menggunakan *path analysis*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan skor hasil rekapitulasi angket untuk variabel pengawasan yang terdiri dari 15 butir pernyataan dengan 100 responden dihasilkan sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Angket Variabel Pengawasan**

No.	Pernyataan	Skor yang dicapai
1	Adanya alat ukur pengawasan pihak Kecamatan Pancatengah digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil kerja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	385
2	Adanya penetapan standar pengawasan oleh Kecamatan terhadap pelaksanaan PBB.	263
3	Camat Pancatengah mampu menentukan pengukuran pelaksanaan PBB secara tepat sasaran.	391
4	Dalam mengukur pelaksanaan PBB, kecamatan rutin melaksanakan pengamatan terlebih dahulu.	387
5	Kecamatan memberikan informasi secara lisan untuk pelaksanaan PBB	393
6	Kecamatan memberikan informasi secara tertulis untuk pelaksanaan PBB	423
7	Untuk kelancaran pembayaran PBB, kecamatan memberikan metode praktis.	380

8	Tujuan pengawasan dilaksanakan untuk memperbaiki adanya penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan.	403
9	Untuk mengukur keberhasilan PBB, kecamatan Pancatengah mengadakan forum dengan menunjuk perwakilan tiap desa untuk membahas tentang pelaksanaan PBB.	431
10	Adanya pengukuran pelaksanaan PBB secara <i>continue</i> (berulang-ulang)	405
11	Kecamatan Pancatengah sering melakukan pengukuran hasil PBB dan membandingkan hasil yang telah diukur dengan target/standar yang telah ditetapkan	397
12	Adanya tindakan perbaikan dari Kecamatan Pancatengah bagi yang tidak membayar PBB	398
13	Untuk memperbaiki masalah PBB, kecamatan Pancatengah mengubah standar untuk peningkatan kualitas.	397
14	Untuk memperbaiki masalah PBB, Kecamatan Pancatengah memberikan kesempatan dengan cara memperpanjang pelaksanaan pembayaran PBB.	273
15	Kecamatan Pancatengah melaksanakan perbaikan pembayaran PBB karena adanya pengawasan dari pihak Kecamatan.	370
	Jumlah	5696

*Sumber: Hasil Penelitian, 2023*

Dari tabel rekapitulasi jawaban responden mengenai pengawasan dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, diperoleh total skor 5696 dengan rata-rata 379,73. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa tanggapan responden atas pengawasan dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya jika dikonsultasikan dengan kategori persentase penilaian berdasarkan Arikunto (2001: 246) terletak pada kategori baik.

Berdasarkan skor hasil rekapitulasi angket untuk variabel efektivitas yang terdiri dari 17 butir pernyataan dengan 100 responden dihasilkan sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Angket Variabel Efektivitas**

No.	Pernyataan	Skor yang Dihasilkan
1	Masyarakat Kecamatan Pancatengah melaksanakan pembayaran PBB tepat waktu	332

2	Masyarakat mengetahui pendelegasian tugas oleh Kecamatan untuk pembayaran PBB	381
3	Untuk memperlancar pelaksanaan PBB, petugas kecamatan memandang perlu adanya turun tangan.	330
4	Produktivitas kerja kecamatan pancatengah dalam PBB menghasilkan efektivitas kerja yang baik.	367
5	Kecamatan Pancatengah memberikan arahan bahwa PBB penting	418
6	Masyarakat Pancatengah mengetahui tujuan adanya PBB.	389
7	Camat Pancatengah memberikan dorongan dalam pelayanan PBB.	414
8	Kecamatan Pancatengah memberikan bantuan pada masyarakat untuk memberikan jalan keluar dalam pembayaran PBB tepat waktu.	326
9	Kecamatan Pancatengah memberikan bantuan informasi dalam pelaksanaan PBB.	398
10	Petugas kecamatan melaksanakan tugas dengan baik dalam pembayaran PBB tepat waktu	385
11	Pihak kecamatan menyelesaikan persoalan PBB untuk dievaluasi	403
12	Dengan pengawasan, pembayaran PBB masyarakat dapat dipantau tepat waktu.	416
13	Dengan pengawasan kecamatan, dapat memperkecil risiko masyarakat tidak melaksanakan PBB dengan tepat waktu.	411
14	Kantor Kecamatan Pancatengah memiliki tata ruang yang nyaman ketika berkonsultasi mengenai PBB	412
15	Kantor Kecamatan Pancatengah memiliki tata cahaya yang nyaman ketika berkonsultasi mengenai PBB	412
16	Kantor Kecamatan Pancatengah memiliki sarana yang lengkap ketika berkonsultasi mengenai PBB	410
17	Kantor Kecamatan Pancatengah memiliki peralatan yang modern ketika berkonsultasi mengenai PBB	412
		6.616

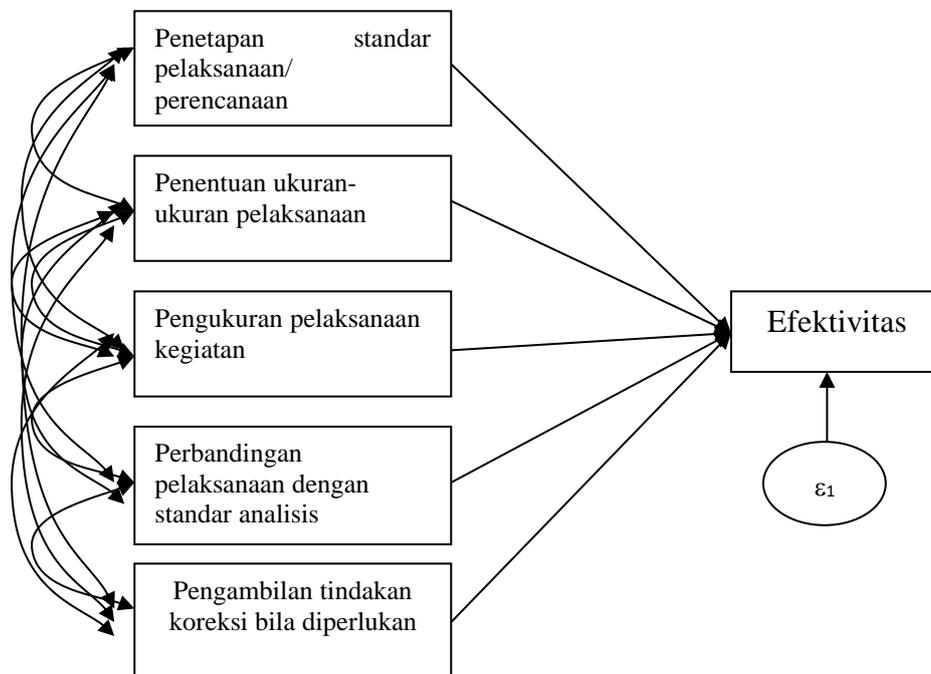
*Sumber: Hasil Penelitian, 2016*

Dari tabel rekapitulasi jawaban responden mengenai efektivitas dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, diperoleh total skor 6.616 dengan rata-rata 389,18 atau dengan persentase sebesar 77,836% dari kriteria yang ditetapkan, jika dikonsultasikan dengan kategori persentase penilaian berdasarkan Arikunto (2001: 246) terletak pada kategori baik.

Besarnya pengaruh Pengawasan (X) terhadap Efektivitas (Y) Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan

Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari indikator yang digunakan oleh masing-masing variabel dengan menggunakan *Path Analysis*. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang diperlukan maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan uji t yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pengawasan terhadap efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, dimana hasil pengolahan data dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 20.0.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 20.0, untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan diperoleh hasil  $R^2$  (R-square) sebesar 0.180 (data terlampir). Jika dituangkan dalam bentuk diagram jalur sebagai berikut:



Gambar 1 Path Analysis

Dasar perhitungan pengaruh antar variabel tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Formula Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antara Variabel Penelitian**

No.	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Variabel <math>X_1</math></li> <li><math>Y \leftarrow X_1 \rightarrow Y:(0,050)^2</math></li> </ul>	-	0,0025
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (0,050) (-0,105) (0,015)</li> <li>• (0,050) (0,243) (0,108)</li> <li>• (0,050) (0,124) (0,155)</li> </ul>	0,0064797

		• (0,050) (0,281) (0,305)	
	Total pengaruh $X_1 \rightarrow Y$	-	0,0089797
2.	▪ Variabel $X_2$ $Y \leftarrow X_2 \rightarrow Y:(0,015)^2$		0,000225
		• (0,015) (-0,105) (0,050) • (0,015) (0,082) (0,108) • (0,015) (0,005) (0,155) • (0,015) (0,290) (0,305)	0,0013925
	Total pengaruh $X_2 \rightarrow Y$		0,0016175
3	▪ Variabel $X_3$ $Y \leftarrow X_3 \rightarrow Y:(0,108)^2$		0,011664
		• (0,108) (0,243) (0,050) • (0,108) (0,082) (0,015) • (0,108) (-0,036) (0,155) • (0,108) (0,286) (0,305)	0,01026
	Total pengaruh $X_3 \rightarrow Y$		0,021924
4	▪ Variabel $X_4$ $Y \leftarrow X_4 \rightarrow Y:(0,155)^2$		0,024025
		• (0,155) (0,124) (0,050) • (0,155) (0,005) (0,015) • (0,155) (-0,036) (0,108) • (0,155) (0,189) (0,305)	0,0009305
	Total pengaruh $X_4 \rightarrow Y$		0,03333
5	▪ Variabel $X_5$ $Y \leftarrow X_5 \rightarrow Y:(0,305)^2$		0,093205
		• (0,305) (0,281) (0,050) • (0,305) (-0,107) (0,015) • (0,305) (0,286) (0,108) • (0,305) (0,189) (0,155)	0,02215
	Total pengaruh $X_5 \rightarrow Y$	-	0,115175
	Total pengaruh $X_1, X_2, X_3, X_4$ dan $X_5$		0,180

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (data setelah diolah)

Berdasarkan tabel dan diagram jalur tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengaruh sub variabel pengawasan yaitu penetapan standar pelaksanaan/ perencanaan terhadap efektivitas adalah sebesar 0,898%, total pengaruh sub variabel pengawasan: penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan terhadap efektivitas sebesar 0,162%. Pengaruh sub variabel pengawasan; pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap efektivitas adalah 2,19%. Total pengaruh sub variabel pengawasan: perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan terhadap efektivitas adalah 3,33%, pengaruh sub variabel pengawasan; Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah 11,52%.

Secara simultan, total pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan

Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 0,180, artinya setiap perubahan pengawasan akan menyebabkan perubahan sebesar 18% terhadap efektivitas.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis secara simultan terdapat pengaruh signifikan Pengawasan terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dengan besarnya pengaruh tersebut peningkatan Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan secara berarti dipengaruhi oleh pengawasan.

Dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengawasan, efektivitas pencapaian target PBB cenderung negatif. Sehingga dapat diperoleh implikasi bahwa pengawasan yang terdiri dari penetapan standar pelaksanaan/perencanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan sangat mempengaruhi Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan tersebut, maka pengawasan harus dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu yang akan datang.

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan juga dapat diartikan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. Selain itu pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari pelayanan yang diberikannya. Fungsi pengawasan mempunyai kaitan yang erat terhadap efektivitas suatu kegiatan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan terhadap efektivitas pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, artinya semakin meningkat pengawasan akan semakin meningkatkan efektivitas.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Sosialisasi dengan penyuluhan kepada masyarakat Pancatengah agar lebih ditingkatkan, perekrutan petugas lapangan yang berkualitas terkait pemungutan PBB. Pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar lebih dipercepat supaya target penerimaan bisa dicapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak, hal tersebut untuk menghindari wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Perlu terus diupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masa yang akan datang realisasinya terus meningkat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coleman M. & Bush T. 2006. *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar manajemen*. Jakarta: Kencana
- Griffin, Ricky W. 2004. *Management*. Boston: Houghton Mifflin.
- Handoko, T. Hani. 1998. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Husnaini. 2001. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kadarman, A.M. dan Udayana, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Kertonegoro. 1998. *Manajemen Organisasi*. Jakarta : Penerbit Widya Press
- Lubis, Ibrahim.1985. *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam masyarakat*. Jakarta timur: Ghalia Indonesia.
- Manullang. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Medan: Monara.
- Maringan Masri. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Meliala, Tulis dan Oetomo, Fransisca Widianti. 2010. *Perpajakan dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Reksohadiprodjo. S. dan Brodjonegoro. 2000. *Ekonomi Lingkungan. (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: BPFE.
- Siagian, Sondang P.1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (cetakan 15). Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Oberlin. 2002. *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Simbolon Anthon. 2004. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UGM
- Singarimbun, dan Effendi. 2009. *Metode Penelitian Survey*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Suganda, Azis. 1999. *Pendidikan Tinggi Era Indonesia Baru*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sutarto. 2000. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tarwiyah Tuti, Adi. 2005. *Kebijakan pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tery, George. 2006. *Asas-asas Manajemen Alih Bahasa*; Winardi. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tjiptono, Fandy and Anastasya. 2003. *Total Quality Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Edisi Kedua. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Umar, Husein. 2000. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Prabowo, Dkk, 2011. *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*. Yogyakarta: Graha Ilmu.